

BAB III

UPAYA PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN DALAM KERANGKA KERJASAMA *PARTNERSHIP*

Bab tiga akan berfokus pada awal mula terbentuknya IAPFS (atau *partnership*) yang kemudian merujuk pada tujuan kerjasama dalam bidang ketahanan pangan di negara-negara berkembang khususnya Indonesia oleh Australia. Setelah mengetahui gambaran umum dan tujuannya, peneliti akan menjelaskan kesesuaian program *partnership* dengan kebijakan pemerintah dalam sektor terkait. Kesesuaian program yang dibahas dalam bab ini akan menjadi awal pembahasan yang lebih mendalam pada bab berikutnya.

3.1 Gambaran Umum *Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector*

Indonesia Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector atau secara singkat disebut *Partnership* adalah kerjasama yang dikembangkan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam menyikapi tren pasokan daging dunia yang meningkat dari tahun ke tahun. Selain meningkatnya permintaan, Indonesia juga mengalami penurunan produksi dalam negeri akibat timpangnya persentase produksi impor dan ekspor. Jalan yang ditempuh pemerintah dalam memenuhi permintaan daging sapi tersebut adalah dengan melakukan impor namun juga terkendala dengan tingginya harga sapi dari negara-negara pengeksport⁵⁹.

⁵⁹ Jalan Muram Swasembada Daging, September 2019,
<https://kolom.tempo.co/read/1245305/jalan-muram-swasembada-daging> (online) diakses 10 Januari 2020 12:00

Timbunan masalah ini menyebabkan Indonesia belum mampu memenuhi permintaan daging sapi sehingga dapat pula digambarkan dengan ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi ketahanan pangan⁶⁰.

Partnership antara Indonesia dan Australia memiliki tujuan dan komitmen untuk menggabungkan kekuatan kedua negara dalam peningkatan rantai pasokan dalam sektor daging merah dan sapi di Indonesia. Komitmen tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan iklim perdagangan yang sehat dan stabil antara Indonesia dan Australia. *Partnership* dirancang akan berlangsung selama 10 tahun yang dimulai pada tahun 2013 hingga tahun 2023. Pendanaan awal dalam pembentukan komitmen ini senilai AUD \$60 juta yang dihimpun oleh pemerintah Australia dan kontribusi dari negara mitra yang terlibat dalam proyek *partnership*⁶¹. Adapun tujuan *partnership* ini dibagi menjadi empat poin utama yaitu,

1. Meningkatkan ketahanan pangan Indonesia yang bersamaan dengan peningkatan keberlanjutan, produktivitas dan daya saing sektor daging merah dan sapi dalam jangka Panjang
2. Berbagi pengetahuan yang diselenggarakan dalam pertemuan rutin antara pemerintah dan sektor terkait untuk memastikan terjalinnya kerjasama dan pemahaman yang setara, efektif dan efisien
3. Memperkuat relasi dalam artian saling mendukung adanya iklim investasi dan hubungan dagang dalam sektor daging merah dan sapi

⁶⁰ Program Kami, Website Resmi *Partnership*,
<http://www.redmeatcattlepartnership.org/about/1/our-program> (online) diakses 13 Januari 2020
13:11

⁶¹ Ibid,

antara Australia dan Indonesia dengan cara memberikan fasilitas kerjasama yang erat dan bermakna antara kedua negara

4. Meningkatkan keahlian sehingga dapat mendukung program pertukaran keahlian dalam menguatkan peluang pembelajaran dalam sektor daging merah dan sapi⁶².

Partnership diketuai bersama oleh perwakilan dua negara yaitu pemerintah Indonesia dan Australia. Dari sisi Indonesia diketuai oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal atau BKPM sedangkan Pemerintah Australia diwakili oleh jajaran Asisten Sekretaris Pertama, Divisi Perdagangan dan Akses Pasar dari Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air atau *Department of Agriculture and Water Resource* atau DAWR⁶³. Anggota *Partnership* terdiri dari pejabat senior pemerintahan dan industri terkait. Susunan jajaran anggota dapat dilihat dalam Tabel 3.1⁶⁴.

⁶² Dalam definisinya daging merah yang dimaksud secara umum mencakup daging dari binatang sapi, kerbau, kuda, dan babi. Warna daging ditentukan oleh kadar pigmen myoglobin dalam daging atau sejenis protein darah yang memiliki peran dalam mengikat oksigen dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Daging sapi sejatinya memiliki warna merah yang lebih pekat dibandingkan kambing, babi atau hewan lain yang disebutkan sebelumnya. (Sumber definisi: <https://tirto.id/membedah-plus-minus-daging-merah-dan-putih-cvDQ> diakses 11 Juni 2020)

Dalam penelitian ini penyebutan daging merah dan daging sapi secara bersamaan dirunutkan dari nama organisasi asli *partnership* dan bukan penjelasan daging merah secara umum. Pasokan daging yang diteliti juga hanya mencakup penjelasan pasokan daging sapi dan bukan daging babi, kuda maupun kerbau.

⁶³ Ibid,

⁶⁴ Ibid,

Tabel 3.1 Susunan Anggota Partnership

Pemerintah Indonesia	Pemerintah Australia	Australia dan Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air (DAWR)	Perwakilan Industri dari sektor pengolahan dan produksi, ekspor serta pembiakan sapi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemko Perekonomian)	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT)	
Kementerian Pertanian (Kemenpar)	Komisi Perdagangan Australia (Austrade atau <i>Australian Trade Commission</i>)	
Kementerian Perdagangan (Kemendag)		
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		

Anggota *Partnership* turut berperan aktif dalam menjalankan pengawasan dan tata kelola program kerjasama melalui Kelompok Kerja Sektorial atau disebut *Sectoral Working Groups* (SWG). SWG dibagi lagi menjadi tiga yaitu Pembiakan atau *Breeding*, Pengolahan atau *Processing* dan Transportasi Logistik. Ketiga SWG tersebut bekerjasama langsung dengan Sekretariat Partnership di BKPM dan DAWR dengan dukungan teknis dari kontraktor pengelola program *Partnership*. Kesemua program dan anggotanya biasa disebut dengan *Advisory and Support Group* atau ASG⁶⁵.

Anggota *Partnership* bertemu dua kali dalam setahun untuk membahas permasalahan yang menjadi fokus perhatian antara dua negara. Pertemuan juga

⁶⁵ Briefing Pack Indonesia Australia Red Meat & Cattle Partnership, Laporan resmi BKPM dan Australian Government (online) diakses 13 Januari 2020 13:11

membahas dan mengidentifikasi peluang dalam peningkatan rantai pasok sektor daging merah dan sapi di Indonesia dari waktu ke waktu. Anggota Partnership juga diharuskan untuk terus menjalin komunikasi dan berkonsultasi dengan kelompok industri di Indonesia dan Australia. Hubungan ini diselenggarakan dalam bentuk lokakarya maupun pertemuan resmi⁶⁶. Adapun kelompok industri Australia yang terlibat dalam Advisory and Support Group (ASG) adalah Dewan Penasihat Daging Merah (*Red Meat Advisory Council/RMAC*), Dewan Industri Daging Australia (*Australian Meat Industry Council/AMIC*), Dewan Eksportir Ternak Australia (*Australian Livestock Exporters' Council/ALEC*), Asosiasi Pelaku Usaha Penggemukan Sapi Australia (*Australian Lot Feeders' Association/ALFA*), Dewan Ternak Sapi Australia (*Cattle Council of Australia*), Dewan Industri Ternak Kambing Australia (*Goat Industry Council of Australia/GICA*), Dewan Daging Domba Australia (*Sheepmeat Council of Australia*), Korporasi Pengolah Daging Australia (*Australian Meat Processor Corporation/AMPC*), *Livecorp*, dan *Meat and Livestock Australia (MLA)*⁶⁷.

Sedangkan dari sisi Indonesia, kelompok industri yang terlibat dalam ASG adalah Dewan Daging Sapi Nasional, Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI), Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI), Komite Daging Sapi, Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia (APPHI), Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (*National Meat Processor Association/NAMPA*), Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO), Gabungan Perusahaan Pembibitan Sapi Potong Indonesia

⁶⁶ ibid

⁶⁷ ibid

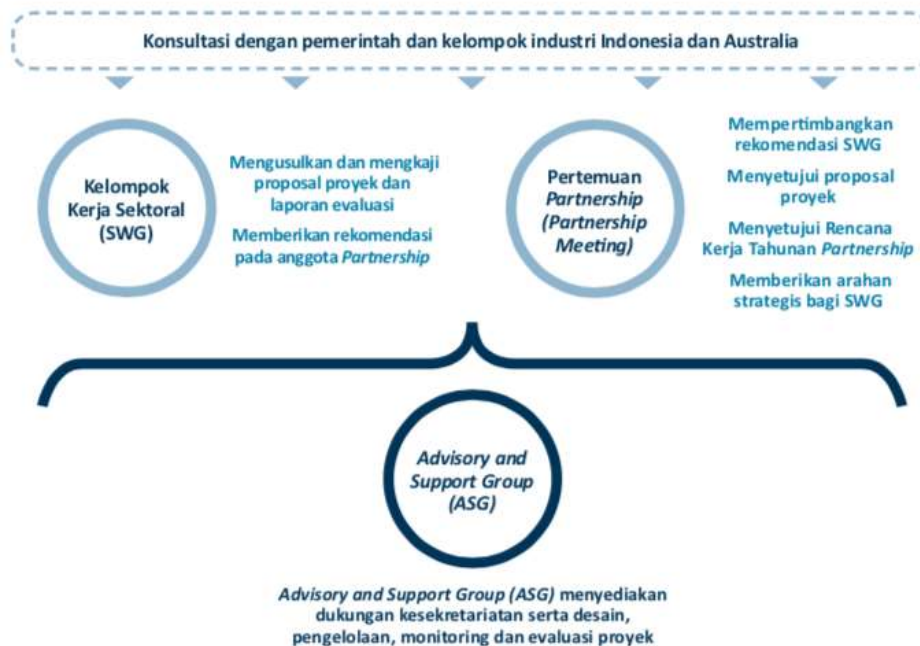
(GAPPSI), Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Komunitas Sapi Indonesia atau KSI⁶⁸.

Tata kelola *Partnership* diawali dengan konsultasi pemerintah dan kelompok industri Indonesia dan Australia. Hasil konsultasi kemudian diajukan pada SWG atau Kelompok Kerja Sektorial dalam *Partnership Meeting*. SWG memiliki andil dalam mengusulkan dan mengkaji proposal proyek dan laporan evaluasi. Selain itu SWG dapat memberikan rekomendasi pada anggota *partnership*. Dalam pertemuan *partnership*, usulan-usulan dan rekomendasi SWG akan dipertimbangkan yang kemudian akan merujuk pada persetujuan proposal proyek. Pertemuan ini juga dapat menyetujui Rencana Kerja Tahunan *Partnership* dan juga memberikan arahan yang strategis bagi SWG. Sedangkan, ASG atau *Advisory and Support Group* bertugas untuk menyediakan dukungan kesekretariatan serta desain, pengelolaan, *monitoring* serta evaluasi proyek⁶⁹. Adapun susunan tata kelola *Partnership* dapat dilihat pada Gambar 3.1 Tata Kelola *Partnership* di bawah ini⁷⁰.

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ Briefing Pack Indonesia Australia Red Meat & Cattle Partnership, Laporan resmi BKPM dan Australian Government [online](#)) diakses 13 Januari 2020 13:11

⁷⁰ Briefing Pack Indonesia Australia Red Meat & Cattle Partnership, Laporan resmi BKPM dan Australian Government [online](#)) diakses 13 Januari 2020 13:11



Gambar 3.1 Tata Kelola Partnership

Sumber: *Briefing Pack Indonesia Australia Red Meat & Cattle Partnership*

Dana *Partnership* terdiri dari \$50 juta bantuan pembangunan resmi atau *Official Development Assistance* (ODA), yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, dan sebesar \$10 juta diluar dana ODA dan dikelola langsung oleh Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air (DAWR). Pada April 2016, lebih dari \$AUD 15 juta telah dikontribusikan oleh kemitraan untuk program-program di bidang pengembangan prioritas di sektor daging merah dan sapi, seperti pembibitan, transportasi dan logistik, *processing* dan pengembangan keterampilan⁷¹. Program yang didanai sejak berjalannya program dari 2013 meliputi⁷²,

⁷¹ *Trade and Market Access*, Situs Resmi Agrikultur Australia, <https://www.agriculture.gov.au/market-access-trade/indonesia-australia#partnership-eupdate> (online) diakses 13 Januari 2020 13:1

⁷² Ibid,

1. *Indonesia-Australia Commercial Cattle Breeding Program* dengan dana \$ 8 juta yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan menengah hingga besar dan koperasi peternak kecil dalam pengembangan model pembibitan sapi potong yang berkelanjutan dan dapat dijadikan komersil. Hasil dari proyek terkait akan dibagi dengan industry sapi potong komersial yang lebih luas di Indonesia. Hasil yang didapat juga memungkinkan untuk memunculkan inovasi, ekspansi dan investasi pada sektor terkait.
2. *Skills Development Short Courses* atau Pengembangan Ketrampilan dengan dana \$ 5,5 juta ini mendukung transfer ketrampilan dan kemampuan antara peternak Australia dan Indonesia. Program ini menjangkau seluruh rantai pasokan dari produsen dan pengolah hingga pembuat kebijakan yang turut bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan pertanian dan perdagangan. Program ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan kejuruan untuk pekerja industri terkait untuk mempromosikan kompetensi global.
3. *Development of a Best Practice Guideline* adalah pemberian praktik terbaik industri yang sedang dikembangkan untuk peningkatan fasilitas penanganan dan transportasi ternak di tempat-tempat khusus distribusi sapi Indonesia. Pedoman ini diterbitkan dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang mencakup informasi terperinci pelabuhan sapi di Indonesia, transportasi antar pulau, informasi bongkar muat, transportasi dan distribusi pakan ternak, serta informasi terkait penampungan dan Rumah Potong Hewan (RPH)

4. *Development of Standard Operating Procedures (SOPs) in Indonesian Abbatoirs* atau program yang memiliki fokus pada penerjemahan dan fasilitas pengembangan SOP standar kebersihan praktis dan produksi daging yang higienis di RPH Indonesia. Hasil dari kegiatan ini mendukung sektor pengolahan daging Indonesia dengan peningkatan praktis kebersihan hingga sanitasi yang layak. Hal ini dipersiapkan untuk memungkinkan industry masuk ke ekspor global yang sesuai standar.
5. *Northern Territory Cattlemen's Association (NTCA) Pastoral Student Programme* atau program yang ditujukan untuk mahasiswa agri di Indonesia dalam melakukan kombinasi pembelajaran yang terakreditasi dan berbasis kompetensi. Para sarjana ini diharapkan dapat memiliki pengalaman kerja nyata di industri peternakan di beberapa perusahaan peternakan sapi terkemuka di Australia.
6. Program Dukungan Peternak Kalimantan Timur yang menyediakan pengawasan ternak sapi pasokan dari Australia di peternakan skala kecil di Kalimantan Timur. Program ini juga mempekerjakan manajer ternak dari Australia yang memiliki pengalaman khusus dalam memberikan saran teknis dan pelatihan tentang kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan peternak bagi staf pemerintah dan layanan penyuluhan sehingga memperoleh pengetahuan yang setara dan sesuai standar.

Selain alokasi dana di atas, dana proyek juga dialokasikan untuk membantu pengembangan industri daging merah dan sapi Indonesia dan Australia yang bersifat kompetitif, efisien, dan berkelanjutan. Kemitraan mempunyai fokus komersial dalam

mempromosikan pengembangan ekonomi dan integrasi sektor daging merah dan sapi Indonesia dan Australia. Kerjasama tersebut akan membantu kedua negara menjadi lebih kompetitif dalam rantai pasokan global daging sapi⁷³. Dijalin dalam forum yang unik, penyatuan *decision maker* Indonesia dan Australia merupakan gabungan yang ahli di bidang industri. *Partnership* akan terus membina hubungan dalam sektor daging untuk pengoptimalan peluang produsen daging merah dan sapi di Indonesia dan Australia.

Sebagai Negara tetangga yang dekat dan mitra dalam rantai pasokan daging global, Indonesia adalah salah satu mitra dagang utama Australia. Perdagangan dua negara yang menguntungkan tersebut menekankan pentingnya kerjasama antara Australia dan Indonesia. Australia juga dapat memahami pentingnya membangun industri ternak dan produksi daging sapi sebagai bagian penting penguatan ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang. Sehingga, jaminan ketahanan pangan menjadi kepentingan bersama. Perwujudan ketahanan pangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosospol, sarana dan prasarana, teknologi, serta iklim dan cuaca⁷⁴.

3.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia Pada Sektor Daging Sapi Melalui PSDS

Sebelum mengkaji kesesuaian program pemerintah Indonesia dengan program *partnership*, peneliti akan menjelaskan secara singkat program pemerintah yaitu PSDS atau Program Swasembada Daging Sapi. Program

⁷³ Buletin Kemitraan – Edisi 1, Oktober 2016, Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air, Canberra, Oktober. CC BY 3.0. [online](#)) diakses 13 Januari 2020 13:11

⁷⁴ 5 Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Indonesia (online) <https://kumparan.com/techno-geek/5-faktor-yang-mempengaruhi-ketahanan-pangan-di-indonesia-1ruhcfSbocZ> diakses 13 Januari 2020 13:11

Swasembada Daging Sapi merupakan bagian dari program pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan secara nasional. Pengertian swasembada daging di sini adalah swasembada *on-trend* yang mencakup 90 persen kebutuhan daging domestic dan 10 persen sisanya dipenuhi melalui aktivitas impor. PSDS Indonesia dicanangkan tahun 2000 dengan target pemenuhan dicapai pada tahun 2005. Bersama dengan Direktorat Jenderal Peternakan, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan strategis. Strategi tersebut adalah sebagai berikut⁷⁵,

1. Pengembangan wilayah berdasarkan komoditas ternak unggulan
2. Pengembangan kelembagaan peternak
3. Peningkatan usaha serta industri peternakan nasional
4. Optimalisasi pemanfaatan pengamanan serta perlindungan sumber daya alam lokal
5. Pengembangan kemitraan yang menguntungkan satu sama lain
6. Mengembangkan teknologi tepat guna

Enam strategi kebijakan tersebut kemudian difokuskan pada tiga sasaran utama seperti pencegahan penurunan tingkat impor sapi bakalan, dan peningkatan pemotongan sapi lokal⁷⁶.

Peraturan dan kebijakan strategis dalam PSDS bertujuan mempercepat pemulihan industri unggas nasional sehingga mampu menopang dan mendorong substitusi daging sapi. Perincian PSDS pada periode 200-2005 dilakukan secara terpadu dan terkonsentrasi diikuti dengan program pengembangan sentra kawasan, substitusi maupun diversifikasi produk. Pembinaan dan pengembangan

⁷⁵ Laporan Ditjennak, 2010, [online](#)) diakses 15 Januari 2020 12:20

⁷⁶ Saptana. 2013. *Dinamika Ke- mitraan Usaha Agribisnis Berdaya-saing dan Berkelanjutan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. Hal. 29

secara kelembagaan dilakukan dengan langkah operasional seperti memperbaiki kinerja unit pelaksana teknis atau UPT agar dapat menghasilkan bibit berkualitas dan mampu beralih ke arah komersialisasi. Selain itu, agar terpusat Balai Inseminasi Buatan atau BIB juga didesentralisasikan agar dapat mempromosikan pengembangan ekspor produk dan pengamanan ternak⁷⁷.

Meskipun telah membentuk program dan langkah yang strategis, PSDS yang dijalankan pada periode pertama ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait belum terbangun secara komprehensif sehingga tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Seminar maupun lokakarya telah dilakukan namun hanya sebatas konsepsi tanpa disertai pelaksanaan yang jelas di lapangan. Program operasional yang disampaikan belum menunjukkan suatu hal yang baru, di samping dukungan anggaran untuk swasembada daging yang masih sangat kurang. Kekurangan PSDS periode pertama disebabkan oleh, kebijakan program tidak disertai dengan program operasional yang terperinci dan juga tidak berorientasi pada komoditas unggulan. Hal tersebut menyebabkan implementasi program tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai evaluasi dampak program. Program yang dicanangkan ternyata juga tidak memberikan dampak pertumbuhan populasi secara nasional karena penyamarataan implementasi yang bersifat *top-down*.⁷⁸

Setelah ketidakberhasilan PSDS pertama, pemerintah kembali mencanangkan Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi atau

⁷⁷ Ibid,

⁷⁸ Yusdja dan C. Muslim, 2004, Pemantapan Program dan Strategi Kebijakan Peningkatan Produksi Daging Sapi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Institut Pertanian Bogor.

disingkat P2SDS dan diproyeksikan selesai pada tahun 2010. Program ini ditargetkan untuk dapat memenuhi kebutuhan daging sebanyak 90 hingga 95 persen dengan sumber daya domestik dan mengurangi persentase impor. Pelaksanaan program tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No.59/Permentan/HK.060/8/2007 atau Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi. Program P2SDS tersebut dibagi lagi menjadi tujuh langkah operasional yang memuat berbagai hal seperti berikut⁷⁹,

1. Optimalisasi akseptor dan kelahiran agar mampu meningkatkan laju pertumbuhan kelahiran ternak
2. Peningkatan dan pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) dan pengendalian pemotongan betina produktif
3. Penyediaan bibit yang bermutu untuk meningkatkan produktivitas hasil daging sapi per satuan waktu
4. Pencegahan dan penanganan gangguan reproduksi dan kesehatan hewan ternak agar tetap sehat serta produktif
5. Pengembangan pakan hasil lokal untuk meningkatkan ketersediaan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku pakan impor
6. Intensifikasi pembiakan secara alami sehingga dapat meningkatkan kelahiran ternak secara sehat dan bersifat berkelanjutan
7. Pengembangan SDM kelembagaan untuk pengembangan aspek managerial usaha ternak sapi poting dan meningkatkan kerja kelembagaan baik di sisi pemerintah dan kelembagaan peternak daerah

⁷⁹ Ibid,

Swasembada sepenuhnya akan diupayakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternakan rakyat atau peternakan kecil. Belajar dari periode sebelumnya, pemberdayaan diarahkan pada kegiatan yang memicu daya saing promosi dan partisipasi masyarakat secara aktif⁸⁰.

Selain pemberdayaan yang bersifat aktif, upaya percepatan kemudian hanya difokuskan pada 18 provinsi yang memiliki kinerja baik di Pulau Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung), Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur), Kawasan Nusa Tenggara (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur), Pulau Kalimantan (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat), Pulau Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo). Delapan belas provinsi tersebut kemudian dikelompokkan lagi ke dalam tiga daerah prioritas untuk pemfokusan area kerja. Pengelompokan ini merupakan perubahan yang mengacu pada kegagalan PSDS di periode sebelumnya dan untuk mendukung percepatan area kerja yang dianggap berkontribusi daripada daerah lainnya.

Sebelum berakhirnya masa program, pada 2009 Kementerian Pertanian mengumumkan bahwa target pencapaian belum juga terealisasikan⁸¹. Indonesia masih mengimpor 40 persen total kebutuhan daging sapi hingga mencapai angka 322,1 ribu ton. Periode ini juga disebutkan gagal karena belum adanya anggaran yang memadai jalannya program. Kontribusi positif yang dihasilkan pada periode itu hanya berhasil pada optimalisasi akseptor dan intensifikasi kawin alam yang

⁸⁰ Opcit, hal. 7

⁸¹ PSDS, 2009,

http://kaltim.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=35 (online) diakses 2 Januari 2020 19:11

dapat memberikan nilai sebesar 79,8 ribu ton dan sapi betina produktif sebanyak 97,2 ribu ekor. Kegiatan pengendalian pada hal pemotongan sapi betina produktif juga mampu menyumbang kontribusi penyelamatan sebanyak 18,9 ribu ekor sapi betina produktif dan kelahiran sebanyak 14,5 ribu ekor. Kegiatan penanganan gangguan reproduksi dapat memberikan kontribusi penyediaan daging sebesar 1,3 ribu ton.⁸²

Belum tercapainya target pencapaian swasembada daging tersebut membuat pemerintah kembali mencanangkan program swasembada daging sapi dengan target selesai tahun 2014. Melalui sejumlah program yang diperbarui, penyediaan daging sapi lokal ditargetkan dapat meningkat dari 67 persen menjadi 90 persen pada akhir diselenggarakannya program. Pemerintah bersama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kemudian menjalankan tiga belas kegiatan operasional baru yang dikelompokkan menjadi lima kegiatan pokok sebagai berikut⁸³,

1. Pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal
2. Pengembangan pupuk organik dan biogas
3. Pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman
4. pemberdayaan dan peningkatan kualitas Rumah Potong Hewan (RPH).
5. Optimalisasi inseminasi buatan (IB) dan kawin alam (INKA)
6. Penyediaan dan pengembangan pakan dan air
7. Penanggulangan gangguan repro- duksi dan peningkatan pelayanan kesehatan

⁸² Ditjennak, 2010, Cetak Biru Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta.

⁸³ Ening Ariningsih, Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 32 No. 2, Desember 2014: 137 – 156

8. Penyelamatan sapi betina produktif
9. Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pem- bibitan
10. Pengembangan usaha pembibitan sapi potong melalui *village breeding center* (VBC)
11. Penyediaan sapi bibit melalui subsidi bunga (KUPS). *Kelima*,
12. Pengaturan stok daging sapi dan bakalan
13. Pengaturan distribusi dan pemasaran daging.

Permentan Nomor 19/ Permentan/OT.140/2/2010 yang memiliki muatan Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014 kemudian kembali menetapkan Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan swasembada daging sapi nasional periode 2010 hingga 2014⁸⁴.

Sama seperti dua program sebelumnya, PSDS tahun 2014 adalah salah satu program utama Kementan untuk pencapaian ketahanan pangan hewani asal ternak dengan sumberdaya lokal sebagai basis operasi. Secara konsep, PSDS bertujuan menambah dan meningkatkan populasi yang diiringi dengan perbaikan mutu sapi potong dengan hasil daging yang terjamin aman, sehat, utuh dan juga halal. Selain itu, semua aspek pemeliharaan juga harus mengandung unsur berkesinambungan⁸⁵. Hal penting dan fundamental yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan PSDS 2014 adalah kemampuan program dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak bersamaan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan daya saing, menjamin usaha ternak yang

⁸⁴ Ibid,

⁸⁵ Ashari, Nyak Ilham, Sri Nuryanti, 2012, *Dinamika Program Swasembada Daging Sapi: Reorientasi Konsepsi Dan Implementasi, Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 10, hal. 181-198

berkesinambungan. PSDS mengaitkan banyak aspek dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, pelaku usaha, dan pengambil kebijakan. Orientasi PSDS tidak hanya melindungi dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan aktivitas impor ternak namun diarahkan agar para peternak dapat meningkat kesejahteraan melalui usahanya. Secara tidak langsung, PSDS 2014 diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas impor daging sapi dan sapi bakalan secara keseluruhan.

Pelaksanaan PSDS 2014 nyatanya membutuhkan sumber daya yang cukup besar dari sisi biaya, waktu maupun tenaga. Ketersediaan anggaran negara menjadi hal yang sangat krusial dalam terselenggaranya program. Keberhasilan PSDS diharapkan tidak saja mampu berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak, agar mampu memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dilihat dari fokusnya program, PSDS 2014 agaknya telah mengalami penyempurnaan dan memiliki tingkat komprehensif yang lebih baik. Sebagai contoh, pelaksanaan PSDS 2014 lebih tertib dengan acuan organisasi yang lebih jelas. Lembaga Pemerintah yang sudah ditunjuk turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan program seperti Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang ikut berperan dalam kajian teknologi dan pakan, LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga memiliki andil dalam sisi pengetahuan budidaya ternak sapi, reproduksi hingga genetika. Kementerian Pendidikan Nasional kemudian juga turut membantu dalam melakukan penelitian dasar bidang peternakan. Instansi-instansi pemerintahan tersebut secara tidak langsung telah

berkontribusi aktif dalam bidang peternakan⁸⁶. Secara singkat, rangkuman Program Swasembada Daging Sapi secara keseluruhan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini⁸⁷,

Tabel 3.1 Deskripsi PSDS 2005, 2010, 2014

Uraian	PSDS 2005	PSDS 2010	PSDS 2014
Kegiatan	<p>Program operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produktivitas dengan program kerja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan ET dan IB diikuti IB terpadu, 2) Upaya persilangan ke arah dual purposes dan 3) Pengembangan sentra baru kawasan. • Peningkatan populasi ternak dengan cara-cara seperti: <ol style="list-style-type: none"> 4) pencegahan pemotongan sapi betina yang masih produktif 5) Pengendalian penyakit terkait reproduksi ternak 6) Penyediaan bibit ternak yang bermutu dari 	<p>Tujuh langkah perasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi akseptor dan kelahiran IB/KA • Pengembangan rumah potong hewan dan pengendalian pemotongan sapi betina produktif/bunting • Perbaikan mutu bibit • Penanganan gangguan reproduksi atau penyakit hewan ternak • Pengembangan pakan ternak dengan skala lokal • inseminasi buatan • Pengembangan SDM dan kelembagaan ditambah kegiatan pendukung. <p>Pendekatan secara ekonomis</p>	<p>Lima kegiatan pokok dengan 13 kegiatan operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan bakalan/daging sapi lokal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan usaha pembiakan/penggemukan sapi lokal, 2) Pengembangan pupuk organik dan biogas, 3) Pengembangan integrasi ternak dan tanaman 4) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH • Peningkatan produktivitas dan reproduktivitas sapi lokal: <ol style="list-style-type: none"> 5) Optimalisasi IB dan INKA, 6) Penyediaan dan pengembangan pakan dan air,

⁸⁶ Ibid, hal. 189.

⁸⁷ Ilham, N., E. Basuno, W.K. Sedjati, Ashari, S. Nuryanti, F.B. Dabukke, dan R. Elizabeth. 2011. Keragaan, Permasalahan dan Upaya Mendukung Akselerasi Program Swasembada Daging Sapi. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Uraian	PSDS 2005	PSDS 2010	PSDS 2014
	<p>aktivitas impor bibit ternak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggantian dan pemenuhan Diversifikasi Produk • Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan melalui: <p>7) Perbaikan kinerja pos sentra pembibitan, 8) Pengembangan lembaga penangkaran bibit ternak rakyat (oleh rakyat sendiri) 9) Desentralisasi BIB, 10) Puspinak 11) Promosi dan pengembangan ekspor produk dan pengamanan ternak.</p>	<p>Pengendalian impor daging sapi dan bibit bakalan</p>	<p>7) Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan layanan kesehatan hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan pemotongan sapi betina produktif <p>8) Penyelamatan sapi betina produktif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan bibit sapi lokal <p>9) Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan, 10) Pengembangan usaha pembibitan sapi potong melalui VBC, 11) Penyediaan sapi bibit melalui subsidi bunga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian stok daging sapi dalam negeri dengan cara <p>12) Mengatur stok sapi 13) Pengaturan distribusi</p>
Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Ditjennak 2000- 2005 2. Makalah akademis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permentan Nomor 59/Permentan/H K.060/2 007 2. <i>Momerandum of Understanding</i> 11 gubernur yang memimpin 18 lokasi program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cetak Biru PSDS tahun 2014 2. Permentan No 19/Permentan/ OT.140/2/201 0 3. Pedoman teknis PSDS

Uraian	PSDS 2005	PSDS 2010	PSDS 2014
Dukungan pendanaan	Cenderung sangat kekurangan	Kekurangan dana	Cukup memadai
Unit manajemen	Tidak terorganisir (organisasi pelaksana tidak dibentuk)	Terorganisir, organisasi pelaksana dibentuk sebagai Tim Teknis, tetapi tidak bersifat operasional	Terorganisir, lebih operasional. Berjenjang dari tingkat Pusat, Prov, Kab/Kota, Kecamatan.

Dari deskripsi tabel di atas, perbaikan telah sangat baik dari sisi pengkonsepan, kebijakan, atau tata kelola program dan manajemen pada PSDS 2014. Walaupun demikian, swasembada daging sapi masih belum dapat diwujudkan sesuai target. Hal tersebut karena berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, mulai dari hulu hingga ke hilir, termasuk dalam sistem yang belum tertata baik sehingga aktivitas impor dan produknya masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keterpenuhan konsumsi rakyat Indonesia. Upaya tersebut seharusnya dibantu juga dengan penstabilan harga daging sapi dengan menciptakan pasar daging domestik yang kompetitif. Hal penting lainnya yang harus sangat diperhatikan pemerintah dalam aktivitas impor adalah ketepatan waktu pelaksanaan serta kejelasan lokasi pemasaran. Dengan tepat waktu dan akuratnya lokasi akan menumbuhkan stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan domestik maupun permintaan yang akurat. Agar mencapai target tersebut, pembenahan administrasi dan birokrasi memerlukan transparansi yang lengkap dan jelas dalam pelaksanaan impor untuk menghindarkan dari permasalahan impor daging dan produk-produk sapi yang beredar di pasar.